

## RINGKASAN

**PRINCESS ANGGUN OCTAFIANY**, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Peran Notaris Dan Implikasinya Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Serikat Pengembang Swadaya Masyarakat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 40/Pid.B/2013/PN.Lsm.) Komisi Pembimbing: Ketua Prof. Dr. Abdul Aziz Nasihuddin, S.H.,M.M.,M.H. dan Anggota Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H.

Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta perubahan anggaran dasar. Tetapi pada kenyataannya terdapat Notaris yang diperkarakan karena telah membuat secara tidak benar akta perubahan anggaran dasar yaitu dengan cara memalsukan akta tersebut mencantumkan ketua umum menghadap dihadapannya serta memalsukan tanda tangannya. Putusan Pengadilan Lhokseumawe Nomor 40/Pid.B/2013/PN.Lsm menyatakan bahwa akta otentik dinyatakan batal demi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Notaris dalam melakukan Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Serikat Pengembang Swadaya Masyarakat (SEPAKAT) di Lhokseumawe dan menganalisis implikasi hukum terhadap akta Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Serikat Pengembang Swadaya Masyarakat (SEPAKAT) yang dipalsukan pada Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 40/Pid.B/2013/PN.Lsm.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Penyajian data dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis. Metode analisis data secara normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Peran Notaris dalam melakukan Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Serikat Pengembang Swadaya Masyarakat (SEPAKAT) di Lhokseumawe tidak sesuai dengan kewenangan Notaris yang diatur dalam Pasal 15 UUJN dan kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 16 UUJN. Notaris IZD terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik yaitu dengan cara memasukan kehadiran penghadap, identitas, dan tanda tangan. Kedua, Implikasi hukum terhadap akta Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Serikat Pengembang Swadaya Masyarakat (SEPAKAT) yang dipalsukan pada Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 40/Pid.B/2013/PN.Lsm yaitu akta batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada perjanjian, tidak pernah menghadap dihadapan Notaris IZD dan tidak pernah ada akta perubahan anggaran dasarnya.

**Kata Kunci : akta otentik, notaris, tindak pidana pemalsuan.**

## **SUMMARY**

**PRINCESS ANGGUN OCTAFIANY**, Notary Masters Study Program, Faculty of Law, Jenderal Soedirman University, *The Role of Notaries and Their Implications in the Crime of Forgery of Amendments to the Articles of Association of Non-Governmental Development Union Institutions (Study of Lhokseumawe District Court Decision Number 40/Pid.B/2013/PN.Lsm)*, Supervisory Commission: Chair Prof. Dr. Abdul Aziz Nasihuddin, S.H., M.M., M.H and Member Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H.

A notary has the authority to make a deed of amendment to the articles of association. However, in reality there is a Notary who is being prosecuted for having incorrectly drawn up a deed of amendment to the articles of association, namely by falsifying the deed, including the general chairman facing him and falsifying his signature. Lhokseumawe Court Decision Number 40/Pid.B/2013/PN.Lsm stated that the authentic deed was declared null and void. This research aims to analyze the role of the Notary in making changes to the Articles of Association of the Self-Help Developers Union (SEPAKAT) in Lhokseumawe and analyze the legal implications of the deed of Amendment to the Articles of Association of the Self-Help Developers Union (SEPAKAT) which was falsified in the Lhokseumawe District Court Decision Number 40/Pid.B/2013/PN.Lsm.

This research is normative legal research with statutory, conceptual and case approaches. The data source used is secondary data. Data collection was carried out through literature study. Presentation of data in the form of systematically arranged descriptions. The data analysis method is normatively qualitative.

The results of the research show that: First, the role of the Notary in making changes to the Articles of Association of the Self-Help Development Union (SEPAKAT) in Lhokseumawe is not in accordance with the authority of the Notary as regulated in Article 15 UUJN and the obligations of the Notary as regulated in Article 16 UUJN. Notary IZD was proven to have committed the criminal act of forgery of an authentic deed, namely by including the presence of the presenter, identity and signature. Second, the legal implications of the deed of amendment to the Articles of Association of the Self-Help Developers Association (SEPAKAT) which were falsified in Lhokseumawe District Court Decision Number 40/Pid.B/2013/PN.Lsm, that is the deed is null and void and it is deemed there was never an agreement never appeared before an IZD Notary and there was never a deed of amendment to its articles of association.

**Keywords : authentic deed, notary, fraudulent act.**